Pj Bupati Kudus Wajibkan Tamu Dinas Menginap di Kudus untuk Pacu Perekonomian Daerah

/Cukup Reservasi Online, Dukung Digitalisasi/

KUDUS - Pemkab Kudus punya cara unik untuk mendongkrak perekonomian daerah. Salah satunya dengan mewajibkan para tamu kedinasan dari luar daerah untuk menginap di Kabupaten Kudus.

Tak perlu lagi surat menyurat yang dikirim secara fisik, urusan administrasi dan birokrasi kini bakal lebih mudah melalui layanan digital.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 400.14.1.14/2409/2024 Tentang

Pengajuan dan Pengelolaan Tamu

Dinas Kunjungan Kerja di Lingkungan Perkab Kudus.

Dalam edaran itu selain menginap di Kudus, para tamu kedinasan luar daerah juga diminta untuk melakukan reservasi secara digital

Pj Bupati Kudus, M. Hasan Chabibie menuturkan, kebijakan ini diharapkanmemberi mutiplier effect/efek domino pada peningkatan perekonomian daerah.

Dengan menginap di Kudus,tak hanya bisnis perhotelan yang mendapat manfaat, diharapkan usaha kuliner dan pariwisata di daerah juga akan semakin tumbuh.

Kebijakan ini juga diringi dengan upaya untuk terus mengenalkan potensi-potensi yang ada di Kudus, termasuk potensi kuliner, wisata, hingga UMKM yang ada.

"Ada tiga poin yang menjadi faktor pendukung dalam kebijakan digital ini. Yaitu digital bureucracy (birokrasi digital), digital culture (budaya digital), dan digital competence (kompetensi digital) baik oleh Pemkab Kudus maupun semua pihak yak terkait," katanya.

Hasan menambahkan, Perkab Kudus terus mendorong perluasan digitalisasi di segala lini mengingat tingginya tingkat penetrasi internet di

Penerapan digitalisasi untuk tamu kedinasan ini sekaligus untuk menyambungkan kelompok usaha dengan ekosistem digital yang ada.

Kepala Bagian Prokompim Setda

Kudus Rokhis Purwadi menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan Pasal 62 Perbup 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Dalam Perbup itu disebutkan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Setda memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja atau studi banding dari luar daerah.

la mengatakan, Sekretaris Daerah melalui Bagian Prokompim nantinya yang akan mengkoordinasikan dan pembagian tugas masing-masing OPD terkait. Disebutkan, tamu dinas yang melaksanakan kunjungan kerja ke

Kabupaten Kudus, wajib mengunap di wilayah Kudus dengan menunjukkan bukti penginapan atau pernyataan kesediaan menginap di wilayah Kabupaten Kudus.

"Sebelum atau sesudah penerimaan tamu dinas, kemudian OPD terkait diwajibkan mengenalkan mempromosikan dan mengarahkan tamu dinas untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Kudus," katanya.

Senada juga dikatakan Kasubag Protokol Bayu Saputro, menurutnya layanan digital ini bermuara pada dua tujuan penting yakni upaya Pemkab Kudus untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu kedinasan dan meningkatkan efektivitas birokrasi. Ia menambahkan, dengan pe ningkatan layanan melalui reservasi digital melalui website ini diharapkan memangkas waktu birokrasi surat .

"Surat menyurat bisa dilakukan via online sehingga lebih cepat dan tak perlu waktu lama jika harus dikirim surat fisiknya," katanya. (\*)